

## Anggaran Responsif Gender: Meminimalisir Disparitas Partisipasi dan Akses Perempuan dalam Pembangunan

<sup>1</sup>Hesti Aprianti, <sup>2</sup>Khaerul Umam, <sup>3</sup>Nanang Suparman

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

e-mail: [hestiaprianti00@gmail.com](mailto:hestiaprianti00@gmail.com), [umam@uinsgd.ac.id](mailto:umam@uinsgd.ac.id), [nanang.suparman@uinsgd.ac.id](mailto:nanang.suparman@uinsgd.ac.id)

**Info Artikel:** Diterima: 17 Juli 2022; Disetujui: 11 November 2022; Dipublikasikan: 2 Desember 2022;

### Keywords

Gender responsive; Budgeting; Women's participation and Access; Development

### Abstract

*The MDGs and SDGs are steps for global development to address various issues and problems that exist in the world, including the issue of gender equality. The gender development index in Bandung shows that there is still a gap in human development between men and women. Therefore, Gender Responsive Budgeting can answer these problems by integrating the needs of both men and women into the budget so that access, participation, control, and development benefits are achieved for all genders. This study aims to analyze the implementation and performance of gender responsive budgeting by Department of Women's Empowerment and Child Protection. The research method used is descriptive study with a qualitative approach, while the data collection techniques is interview, documentation, and literature study. Data analysis techniques include data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the implementation of gender responsive budgeting in the Department of Women's Empowerment and Child Protection has implemented GAP, GBS, and KAK in its program planning, but due to the lack of gender disaggregated data, gender analysis is less effective and make the access, participation, control, and development benefits that are not evenly distribute.*

### Kata Kunci

Anggaran Responsif; Gender; Partisipasi dan Akses; Perempuan; Pembangunan

### Abstrak

MDGs dan SDGs sebagai langkah pembangunan global untuk mengatasi berbagai isu dan permasalahan yang ada di dunia termasuk isu kesetaraan gender. Indeks pembangunan gender di Kota Bandung menunjukkan masih terdapat kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dengan perempuan. Maka dari itu anggaran responsif gender diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut dengan mengintegrasikan kebutuhan laki-laki maupun perempuan kedalam anggaran hingga tercapai akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi semua gender. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis penerapan dan kinerja penyusunan anggaran responsif gender yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan anggaran responsif gender di DP3A sudah melaksanakan GAP, GBS, dan KAK dalam perencanaan programnya, akan tetapi dikarenakan kurangnya data terpilah gender menyebabkan analisis gender menjadi kurang efektif dan berakibat pada akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang belum cukup merata

\* Corespondensi Penulis: ✉ [hestiaprianti00@gmail.com](mailto:hestiaprianti00@gmail.com)

### How to Cite (APA Style):

Aprianti, H., Umam, K., & Suparman, N. (2022). Anggaran Responsif Gender: Meminimalisir Disparitas Partisipasi dan Akses Perempuan dalam Pembangunan. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 4(2), 150-162. <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v4i2.7505>



## Pendahuluan

Millenium Development Goals (MDGs) merupakan kesepakatan dari para pemimpin di berbagai negara untuk melakukan pembangunan global yang disusun secara spesifik dan terukur yang dilaksanakan pada tahun 2000, serta sebagai tanggungjawab dari semua negara yang sebelumnya mengikuti KTT Millenium. Target yang terdapat pada MDGs pun sangat beragam mulai dari isu lingkungan, kesehatan, pembangunan, hingga pada isu gender sehingga yang menjadi dasar hukum bagi deklarasi tersebut tertuang pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/2, (A/Ris/55/2 United Nations Millenium Development Goals). Pencapaian tujuan yang ada pada MDGs itu pun ditargetkan dapat dituntaskan di tahun 2015. Adapun yang menjadi tujuan dan target kuantitatif yang terdapat dalam MDGs meliputi; 1) Meniadakan kemiskinan dan kelaparan; 2) Memperhatikan pendidikan dasar; 3) Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan bagi perempuan; 4) Mengurangi angka kematian bayi; 5) Peningkatan kesehatan ibu; 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; 7) Pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan; 8) Memajukan kemitraan global dalam hal pembangunan (Wahyuningsih, 2018).

Namun waktu yang disepakati pun telah berakhir pada tahun 2015 sehingga para pemimpin negara baik itu Indonesia dan lainnya bersepakat untuk memulai rencana pembangunan global yang baru yakni disebut dengan istilah SDGs atau Sustainable Development Goals. Maka dari itu terdapat sejumlah tujuan yang ada dalam SDGs yakni diantaranya; 1) Meniadakan kemiskinan dalam berbagai bentuk; 2) Mengurangi kelaparan, meningkatkan keamanan pangan serta nutrisi; 3) Memberikan jaminan akan peningkatan kehidupan yang sehat juga kesejahteraan bagi semua orang; 4) Menjanjikan pendidikan yang berkualitas, menyeluruh juga seimbang; 5) Meningkatkan kesetaraan gender serta pemberdayaan bagi semua perempuan; 6) Memastikan tersedianya air dan

sanitasi yang berkelanjutan; 7) Memastikan akses pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; 8) Mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif serta berkelanjutan; 9) Membangun infrastruktur yang berkelanjutan; 10) Mengurangi ketimpangan antar negara; 11) Membentuk pemukiman yang berkualitas, aman, serta berkelanjutan; 12) Memperhatikan keberlangsungan aspek konsumsi juga pola produksi; 13) Memberikan tindakan yang cepat dalam memerangi perubahan iklim serta dampak yang ditimbulkan; 14) Melindungi dan menjaga kehidupan bawah laut; 15) Melindungi, mengembalikan, juga meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat; 16) Menumbuhkan perdamaian, memberikan akses untuk keadilan bagi setiap orang; 17) Memaksimalkan implementasi serta membangun kemitraan global bagi pembangunan yang berkelanjutan (Ngoyo, 2015).

Pada dasarnya, MDGs maupun SDGs memiliki tujuan yang sama, yang pada intinya berakhir pada pencapaian kesejahteraan sosial. Namun berdasarkan dokumen yang disepakati para pemimpin di dunia itu nyatanya sudah berakhir di 2015, dan dirasa perlu untuk dilanjutkan dan melakukan pengembangan dari yang sebelumnya karena situasi dan kondisi serta isu-isu yang ada sudah mulai berubah, sehingga perlu adanya tindak lanjut akan program tersebut. Dalam MDGs isu akan kesetaraan gender terdapat dalam tujuan ketiga dengan meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, sementara itu dalam SDGs, aspek kesetaraan gender terdapat dalam tujuan kelima. Jika dilihat dari tujuan yang ada pada MDGs dan SDGs, keduanya sama-sama menempatkan kesetaraan gender sebagai prioritas dan menjadi isu yang krusial bagi dunia.

Wacana gender (gender discourses) memang menarik untuk dibahas dan memberikan tempat tersendiri bagi masyarakat secara luas. Wacana gender seperti isu-isu gender telah menggema dan merebak dimana mempertanyakan kesetaraan laki-laki dan perempuan (Selvira & Utomo, 2021).

Pemahaman akan gender dikaitkan dengan tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dengan perempuan untuk pemenuhan berbagai macam kebutuhan maupun akses seperti pendidikan, kesehatan, hingga kontribusinya dalam kancah perpolitikan. Dalam rangka mendukung akan konsep tersebut maka pemerintah dalam hal ini presiden mengeluarkan peraturan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mana didalamnya berisi mengenai kewajiban dari berbagai sektor pemerintahan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender baik itu dari segi kebijakan maupun programnya (Eleanora et al., 2021).

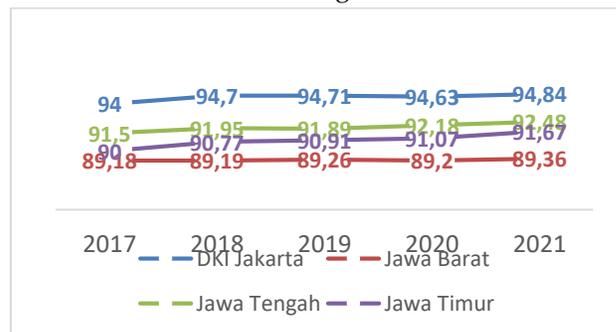
Padahal jika dilihat kembali Indonesia sudah sejak lama meratifikasi CEDAW yakni melalui UU No. 7/1984 tentang ratifikasi Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang menjadi instrumen dalam diadakannya anggaran responsif gender. Namun dalam kenyataannya masih saja ada kesenjangan antara pernyataan politik baik itu berupa kebijakan dan lainnya jika dipadankan dengan langkah pemerintah dalam mengusahakan anggarannya (Elson, 2001). Anggaran dapat merepresentasikan komitmen dalam menjalankan pembangunan, begitupun dengan permasalahan disparitas gender. Adapun istilah Women in Development (WID) sebagai langkah dalam pembangunan yang bukan menempatkan perempuan sebagai beban melainkan sebagai aset dan sasaran dengan meningkatkan partisipasi perempuan didalamnya (Darwanis, 2015).

UNDP sudah sejak lama memperkenalkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh perkembangan gender di suatu wilayah. Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling berpengaruh dan berperan sangat penting dalam pembangunan manusia, maka dari itu dengan mengutamakan kesetaraan gender maka pertumbuhan ekonomi dapat terdistribusi secara adil. IPG hadir untuk menjabarkan

secara jelas seberapa jauh ketimpangan dalam pembangunan jika membandingkan antara laki-laki dengan perempuan.

IPG diperoleh dari rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki, yang mana apabila semakin mendekati angka 100 maka semakin baik kesetaraan gender dalam suatu wilayah. Target capaian IPG nasional yang merujuk pada target Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) di tahun 2019 yakni sebesar 92,00. Tolok ukur dalam pencapaian target IPG nasional tentu besar dipengaruhi oleh rata-rata capaian IPG dari masing-masing daerah. Jika dilihat dalam data yang dirilis oleh Kemen PPPA, hanya terdapat 11 provinsi yang telah mencapai diatas target nasional dan 4 provinsi di atas rata-rata capaian nasional. Sementara itu, provinsi Jawa Barat ada dalam angka 89,26 yang menunjukkan posisinya yang ada dalam rentang yang belum ideal. Posisi Jawa Barat dalam rentang 5 tahun belum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam aspek pembangunan gender dibandingkan provinsi lainnya.

Gambar 1.1 Perkembangan IPG di 4 Provinsi



Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah Peneliti, 2021)

Pembangunan gender yang ada di Jawa Barat masih berada di bawah angka 90, yang mana level IPG ini termasuk kategori rendah di Pulau Jawa. Hal tersebut bukan tanpa alasan, penyebabnya yakni ada pada aspek pendidikan juga pengeluaran perempuan yang masih kalah cepat daripada laki-laki. Bukan hanya dalam aspek pembangunan gender, Jawa Barat juga termasuk kedalam provinsi dengan indeks pemberdayaan gender yang masih dikatakan rendah dan dibawah

angka nasional yakni sebesar 70. Meskipun peningkatan secara nasional menunjukkan harapan dan kemajuan positif namun hal tersebut juga memberikan gambaran terhadap pemerintah untuk lebih memperhatikan tentang aspek gender dalam pembangunan.

**Gambar 1.2** Perkembangan IPG di 3 Kab/Kota



Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah Peneliti, 2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, Kabupaten/Kota tersebut merupakan tiga daerah dengan IPG tertinggi di Jawa Barat, dengan Sumedang menempati posisi pertama yakni sebesar 95.01 pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 yakni 95.18 poin. Sementara itu Kota Bandung dan Kota Cirebon yang sama-sama berada pada poin 94 pada tahun 2019 sampai 2021.

Namun menurut penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa, terdapat korelasi positif antara pendapatan daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi (Juliarini, 2019). Dalam hal ini peneliti memiliki perbedaan dalam segi memilih lokus penelitian yakni di Kab/Kota dan membandingkannya dengan Indeks Pembangunan Gender, karena pada dasarnya IPG juga diperoleh melalui hasil IPM.

**Tabel 1.1** Perkembangan Pendapatan Daerah di 3 Kab/Kota (ribu rupiah)

Kota/Kab	Tahun		
	2019	2020	2021
Kota Bandung	6,381,818,944	5,643,962,288	6,580,614,037
Kabupaten Sumedang	3,069,549,278	2,904,389,475	2,172,149,980
Kota Cirebon	1,655,431,805	1,633,922,078	1,434,738,075

Kota Bandung menjadi salah satu Kota dengan pendapatan daerah tertinggi di Jawa Barat, yang jika dibandingkan dengan kedua Kab/Kota di atas Kota Bandung menempati posisi pertama. Ketiganya sama-sama mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2020 dikarenakan Covid-19 yang melanda dunia pada saat itu. Penurunan pendapatan cukup drastic yang dialami Kabupaten Sumedang pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya dan begitu juga dengan Kota Cirebon, lain halnya Kota Bandung yang justru mengalami peningkatan pendapatan cukup signifikan sebesar 17%. Namun peningkatan pendapatan tersebut nyatanya tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan IPG yang masih dibawah Kabupaten Sumedang dengan kondisinya yang mengalami penurunan pendapatan. Sehingga hal

tersebut patut untuk dipertanyakan dan dianalisis lebih dalam. Atas dasar hal tersebut dipilihlah Kota Bandung sebagai lokus penelitian ini.

Pemerintah Kota Bandung juga mengeluarkan kebijakan untuk mengatur mengenai penerapan anggaran responsif gender di Kota Bandung yang mana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1349 tahun 2018 tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam Pembangunan Daerah yang mana didalamnya memuat tahapan penyusunan anggaran responsif gender yang terdiri atas analisis gender serta penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP). Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 260/Kep.454-DP3APM/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, serta Keputusan Wali Kota Bandung Nomor:

260/Kep.455-DP3APM/2017 tentang Focal Point Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian, dipilihlah yang menjadi objek dalam penelitian ini yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai sekretaris koordinator Pengarusutamaan Gender serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan di Kota Bandung.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pengkajian penulis diantaranya yakni penelitian yang dilakukan oleh Paskanova Christi Gainau, dengan judul “Urgensi Penerapan Anggaran Responsif Gender di Pemerintah Daerah”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penyebab penganggaran responsif gender tidak direspon oleh pemerintah daerah. Penelitian menggunakan metode triangulasi dengan mencoba mencari hal-hal yang menghambat dalam mengimplementasikan penganggaran responsif gender di pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi kendala yakni meliputi pemahaman akan konsep gender di kalangan para pejabat pemerintah, kemauan politik, termasuk adanya penolakan terhadap perubahan (Gainau, 2018).

Penelitian yang serupa sebelumnya dilakukan oleh (Farida, 2019) dengan judul “Anggaran Responsif Gender sebagai Suatu Instrumen Negara untuk Pemenuhan Hak Perempuan di Indonesia”, penelitian tersebut menyatakan bahwa anggaran di Indonesia selama ini masih belum responsif gender. Adapun yang menjadi permasalahan dalam rangka menerapkan ARG di Indonesia meliputi: perspektif mengenai isu gender cukup menjadi tanggungjawab lembaga tertentu dalam pemerintah, perencanaan dan penganggaran yang masih belum menerapkan perspektif gender, pagu indikatif yang diajukan oleh pemerintah masih terbilang kecil, serta keterwakilan perempuan dalam posisi strategis dalam penyusunan APBN yang masih sedikit. Serta solusi yang ditawarkan berupa peningkatan kuota parlemen atau dengan

jalan meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, serta dengan penerapan ARG yang sudah terbukti berhasil di sebagian negara.

Penelitian selanjutnya dari (Setyawan et al., 2018) dengan judul “Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur)”. Hasil penelitian menunjukkan kurang berjalannya Pokja PUG di tingkat pemerintah daerah dan focal point di tingkat SKPD. Serta penyusunan anggaran yang masih belum menggunakan metode GAP dan Gender Budget Statement (GBS). Ditemukan bahwa terdapat tiga faktor yang menghambat penerapan PPRG di Kota Batu, yakni faktor rotasi pegawai dan terputusnya transfer pengetahuan, faktor komitmen pimpinan institusi, dan ketiadaan panduan di lingkup pemerintah Kota Batu, serta faktor perencanaan RPJMD yang kurang maksimal.

Selanjutnya, yang menjadi novelty atau pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada penelitian ini penulis menggunakan teori kinerja penyusunan anggaran responsif gender yang dikemukakan oleh Paskanova Christi Gainau, dengan teorinya yang relevan dengan permasalahan yang peneliti angkat dan membahas semua aspek yang dibutuhkan mulai dari akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam indikatornya. Selain itu, penulis juga melakukan analisis terhadap kinerja penyusunan anggaran responsif gender di Kota Bandung sehingga hasil akhir dalam penelitian ini yakni akan menghasilkan analisis mengenai penganggaran responsif gender di Kota Bandung disesuaikan dengan penggunaan teori yang dipilih. Anggaran responsif gender sebagai penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender, dengan indikator: Pertama, identifikasi kebutuhan laki-laki dan perempuan sebelum penyusunan anggaran. Kedua, menyusun Gender Analisis Pathway, Gender Budget Statement, dan

Kerangka Acuan Kerja (KAK). Ketiga, penetapan program sesuai dengan GAP, GBS, dan KAK. Keempat, memperhatikan kesetaraan jumlah laki-laki dan perempuan dalam menikmati sumber daya. Kelima, memberikan proporsi anggaran yang setara antara laki-laki dan perempuan. Keenam, menyediakan keamanan fasilitas yang setara bagi kaum laki-laki dan perempuan. Ketujuh, melibatkan keikutsertaan yang merata antara laki-laki dan perempuan. Kedelapan, anggaran berdasarkan hasil analisis gender (Ghaniu, 2019). Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan dan kinerja penyusunan anggaran responsif gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

## Metode

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dimana bertujuan untuk memberikan deskripsi atas fenomena yang terjadi secara aktual dan mendalam atas penerapan anggaran responsif gender yang ada di pemerintah Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni diperoleh dari wawancara, studi dokumentasi, serta literatur yang mendukung keberlangsungan penelitian.

Data primer peneliti peroleh dari hasil wawancara terhadap para focal point gender di SKPD atau Badan yang berkaitan dengan persoalan gender di Kota Bandung yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai sekretaris POKJA dalam pengarusutamaan gender di Kota Bandung. Serta data sekunder yang didapatkan dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, maupun dokumen-dokumen pemerintah yang berkaitan dengan penerapan ARG di Kota Bandung. Sampel dari penelitian ini diambil secara purposive, seperti yang diungkapkan oleh Muri Yusuf bahwa penentuan sampel dengan teknik purposive sampling merupakan penentuan sumber informasi yang dilandasi dengan tujuan atau

pertimbangan tertentu terlebih dahulu, hanya pihak yang memahami dan terlibat dalam focal point gender yang dijadikan sebagai informan.

Analisis data yang peneliti pilih sesuai dengan model yang diungkapkan oleh Miles and Huberman yakni diantaranya dengan melakukan reduksi data yakni dengan merangkum, memilih dan memilah data yang sekiranya berhubungan dengan bahasan penelitian. Setelah direduksi maka dilakukan penyajian data dalam hal ini peneliti melakukan pemaparan singkat bersifat naratif dengan mendeskripsikan data-data terkait GAP, GBS, dan KAK yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Langkah akhir yakni dengan melakukan penarikan kesimpulan dari temuan yang didasarkan pada perolehan data hingga menghasilkan gambaran atau deskripsi dari penelitian.

## Hasil

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan anggaran responsif gender dalam rangka meminimalisir disparitas partisipasi dan akses perempuan dalam pembangunan, maka peneliti melakukan analisis yang didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Paskanova Christi Gainau mengenai kinerja penyusunan anggaran responsif gender yang mana haruslah memenuhi beberapa indikator yakni diantaranya sebagai berikut:

Indikator	Hasil
Identifikasi kebutuhan laki-laki dan perempuan sebelum menyusun anggaran	Proses identifikasi kebutuhan laki-laki dan perempuan dilakukan oleh dinas terkait melalui analisis gender untuk mengetahui isu-isu gender. Dengan mengenali isu yang ada maka dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan. Namun menurut data, ditemukan bahwa tidak semua perencanaan kegiatan berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang ada.

Menyusun <i>Gender Analysis Pathway, Gender Budget Statement</i> , dan KAK	Penyusunan GAP, GBS, dan KAK dilakukan oleh seluruh Seksi yang berkaitan dengan peningkatan Akses Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM). Salah satunya Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender melalui programnya yakni peningkatan kualitas hidup perempuan yang secara lengkap memuat lembar GAP, GBS, dan KAK. Terdapat basis data dan analisa data terpilah gender hingga rencana anggaran biaya.
Penetapan program sesuai dengan GAP, GBS, dan KAK	Berdasarkan perbandingan antara Laporan Keuangan Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan lembar GAP, GBS, dan KAK, ditemukan bahwa program yang terdapat dalam lembar tersebut juga terdapat dalam sasaran, indikator kinerja dan realisasi capaian target dalam laporan, sehingga menunjukkan program yang ditetapkan memang merujuk pada GAP, GBS, dan KAK.
Memperhatikan kesetaraan jumlah laki-laki dan perempuan dalam menikmati sumber daya	Proporsi laki-laki dan perempuan yang berpeluang dalam mengikuti program kegiatan masih belum setara. Misalnya jumlah perempuan dalam salah satu program cenderung lebih banyak dibandingkan laki-laki dengan jumlah perempuan unggul dari 187 peserta pelatihan 108 peserta diisi oleh perempuan.
Memberikan proporsi anggaran yang setara antara laki-laki dan perempuan	Dalam rangka mencapai proporsi anggaran yang adil dan setara, anggaran didasarkan pada kebutuhan masing-masing gender. Anggaran tidak dibagi menjadi dua yakni 50% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan. Melainkan didasarkan pada berapa banyak kebutuhan laki-laki dan berapa banyak kebutuhan perempuan. Jumlah pengalokasian anggaran yang masih belum seluruhnya didasarkan pada kebutuhan

	melainkan mengacu pada pagu perangkat daerah.
Menyediakan keamanan fasilitas yang setara bagi kaum laki-laki dan perempuan	Fasilitas yang tersedia meliputi toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, <i>smoking area</i> , dan lainnya. Sarana dan prasarana bukan hanya untuk laki-laki dan perempuan tetapi juga terdapat akses khusus bagi difabel.
Melibatkan keikutsertaan yang merata antara laki-laki dan perempuan	Dilihat dari bagian analisis situasi pada GBS beberapa program menunjukkan partisipasi yang belum merata antara laki-laki dan perempuan, sebagian masih didominasi laki-laki sementara program lainnya mayoritas diikuti oleh perempuan. Sehingga belum menunjukkan keseimbangan dalam partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam masing-masing program.
Anggaran berdasarkan hasil analisis gender	GAP dan GBS memuat isu gender yang dihasilkan dari analisis data terpilah gender sehingga anggaran yang menggunakan metode GAP dalam penyusunannya maka KAK yang berisi jumlah anggaran akan didasarkan pada hasil analisis.

### Pembahasan

Sejalan dengan yang dipaparkan oleh UNIFEM yang dikutip oleh (Sodani & Sharma, 2008) bahwa penganggaran berbasis gender sebagai proses yang memperhatikan perspektif gender dalam berbagai tahap perumusan program ataupun kebijakan, penilaian akan kebutuhan kelompok sasaran, tinjauan kebijakan dan petunjuk yang ada, alokasi sumber daya, implementasi program, penilaian dampak, dan lainnya. Anggaran responsif gender merupakan puncak dari proses tersebut. Jika dikaji maka proses penganggaran reposnif gender tersebut terdiri atas beberapa komponen penting sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan, analisis gender, dan data terpilah

Identifikasi kebutuhan dimulai dari melakukan analisis gender yang menggunakan data terpilah sebagai instrumennya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender di dinas terkait disebutkan bahwa belum adanya data terpilah gender di dinas tersebut. Namun, dalam lembar GAP kolom data terpilah gender terisi dengan proporsi jumlah laki-laki dan perempuan yang mengikuti kegiatan. Dengan begitu, data terpilah di dinas tersebut berupa data yang dikumpulkan oleh masing-masing seksi berdasarkan evaluasi program kegiatannya. Membuat asumsi tentang akses masyarakat terhadap layanan berdasarkan data terpilah gender menurut jenis kelamin di suatu lingkungan mungkin tidak dapat diandalkan dan perlu diperiksa silang menggunakan data tambahan seperti survei pengguna/penerima manfaat, pertemuan kelompok atau lainnya (Erol Akurdan, 2019). Sehingga dibutuhkan data pendukung lain dengan survei atau lainnya yang berhubungan dengan program kegiatan yang dapat mendukung data yang dimiliki.

Sementara itu belum ada tata cara baku penyusunan data terpilah gender yang spesifik dan menyeluruh yang dapat memberikan potret keadaan data pelaku pembangunan dan penerima manfaat dari hasil pembangunan.

Dalam penelitian sebelumnya diungkapkan bahwa akan lebih baik apabila terdapat standarisasi praktik dan metode dalam pengumpulan data terpilah gender di seluruh elemen pemerintahan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dapat merancang template standar per kementerian dan melakukan implementasi percontohan di Kementerian/Departemen. Pengumpulan data terpilah dan integrasinya harus seragam di semua sektor pemerintahan dan harus dipublikasikan di Laporan Tahunan masing-masing Kementerian/Departemen dan tersedia untuk umum (Nikore, et al., 2022).

Dengan demikian dalam hal ini perlu adanya perhatian khusus terkait penyusunan data terpilah

gender, bukan hanya di DP3A tapi juga sektor pemerintahan lainnya. Dan KemenPPPA harus menjadi leading sector yang menegaskan akan hal tersebut.

## 2. GAP, GBS, dan KAK

Terdapat berbagai macam metode dan analisis dalam merencanakan kegiatan yang ada di pemerintahan, diantaranya SWOT, Harvard, dan GAP. Analisis SWOT adalah kerangka perencanaan strategis yang digunakan dalam evaluasi organisasi, rencana proyek atau kegiatan, dengan 2 dimensi terdiri dari internal meliputi kekuatan dan kelemahan dan eksternal meliputi peluang dan ancaman (GÜREL, 2017). Sementara itu, kerangka analisis Harvard adalah perangkat sederhana dan praktis untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah pekerjaan yang dilakukan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, pertanian, atau komunitas. Metode analisis ini juga dapat membantu dalam mendokumentasikan perbedaan dalam akses dan kontrol gender terhadap sumber daya (Ludgate, 2016).

GAP digunakan sebagai alat instrumen analisis gender yang diperuntukkan bagi para perencana untuk menganalisis kebijakan /program /kegiatan dengan menggunakan perspektif gender. Penyusunan program kebijakan menggunakan metode GAP untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat untuk setiap gender dalam proses pembangunan. Sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang memberikan GAP sebagai alat alternatif untuk analisis gender. Dengan demikian, GAP menjadi alat analisis yang digunakan oleh setiap satuan kerja mengingat hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun terdapat metode Harvard yang juga melihat aspek gender didalamnya. Metode analisis GAP yang ada di dinas terkait sudah sesuai dengan template yang diberikan yakni terdiri dari 9 langkah yang harus diisi, meliputi; pilih kebijakan/program/kegiatan yang

akan dianalisis, menyajikan data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, sebab kesenjangan internal, sebab kesenjangan eksternal, reformulasi tujuan, rencana aksi, data dasar, dan indikator gender.

Evaluasi pelaksanaan dari program kegiatan yang responsif gender dilakukan dengan pendekatan indikator kinerja berdasarkan analisis situasi sebagaimana dituangkan dalam GBS yang meliputi input, proses, output, dan hasil. GBS yang dikompilasi setelah DIPA disahkan dapat membuat GBS yang berfungsi sebagai dokumen pendamping untuk penyampaian RKA-K/L menjadi tidak mengikuti peruntukannya. Menurut Bandiyono dikatakan bahwa jumlah dana yang diusulkan dalam GBS harus dibandingkan dengan yang tercantum dalam DIPA satuan kerja (Bandiyono et al., 2022). Pengalokasian yang didasarkan pada pagu perangkat daerah yang menjadi sebab kesenjangan internal juga dapat membuat GBS menjadi kurang efektif dan tidak sesuai peruntukannya. Bukan hanya komitmen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ARG, namun perlu adanya dukungan kapasitas SDM di tingkat birokrasi dan partisipasi masyarakat sipil (Widowati et al., 2016). Anggaran akan disusun berdasarkan hasil analisis gender seperti yang tercantum dalam GAP apabila program yang dijalankan berkaitan dengan APKM.

Dalam Kerangka Acuan Kerja yang berkaitan dengan gender maka didalamnya terdapat deskripsi terkait kesenjangan gender yang menjadi tambahan bagian latar belakang dalam KAK yang dapat diambil dari analisis situasi pada GBS. GBS sebagai bagian dari KAK, namun hanya yang berkaitan dengan anggaran responsif gender (Darwanis, 2015). Maka pada akhirnya KAK merujuk pada GBS, dan GBS merujuk pada GAP, sehingga ketiganya memiliki keterkaitan satu sama lain. Maka dari itu, dinas terkait sudah cukup bertanggungjawab dalam melaksanakan tahapan pengarusutamaan gender melalui pembuatan dokumen GAP, GBS, dan KAK. Sebagaimana

dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa bentuk respons pelaksana khususnya OPD atau satuan kerja dalam melaksanakan PUG dapat dilihat dari disipilin atau tidaknya mereka melaksanakan PPRG dengan adanya dokumen GAP, GBS, dan KAK (Tazkia & Cadith, 2022).

### 3. APKM

Anggaran responsif gender ada bukan hanya berfokus untuk menyediakan anggaran dalam jumlah tertentu bagi pengarusutamaan gender, namun untuk mencari cara agar anggaran tersebut dapat memberikan keuntungan yang adil bagi laki-laki maupun perempuan (Octaria, 2015). Maka dari itu, baik itu dari segi akses, partisipasi, kontrol hingga manfaat pembangunan seharusnya memperhatikan kebutuhan dari masing-masing gender. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Fithriyah bahwa kesetaraan tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki menjadi sama, tapi mengimplikasikan bahwa minat, kebutuhan, dan prioritas laki-laki dan perempuan dipertimbangkan, dengan memperhatikan keragaman grup laki-laki maupun perempuan (Fithriyah, 2017).

Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan belum adanya proporsi yang merata antara laki-laki dan perempuan seperti dalam aspek akses dan partisipasi. Penganggaran sudah seharusnya berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ditemukan, akan tetapi dalam lembar GAP tertulis bahwa sebagian perencanaan kegiatan masih diluar dari kebutuhan, hal ini berdampak kepada adanya sistem penganggaran yang menjadi kurang sesuai. Sebagaimana penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa seharusnya akses yang sama ke sumber daya, distribusi manfaat dan akses layanan oleh semua gender dapat diperoleh dengan adanya penganggaran yang sesuai (Lubaale, 2020). Meskipun begitu, keberadaan perempuan dalam beberapa program menunjukkan kemajuan terlihat dari tingkat partisipasinya yang menjadi mayoritas.

Dilihat dari analisis gender, maka dapat diketahui adanya ketimpangan dalam segi relasi

antara laki-laki dengan perempuan dalam empat hal yakni yang biasa disebut dengan APKM meliputi akses terhadap sumber daya, partisipasi, kontrol dalam menetapkan keputusan, serta manfaat yang dapat dirasakan dari adanya sebuah pembangunan (Koesriwulandari, 2015). Namun, kurangnya partisipasi perempuan bisa disebabkan beberapa hal, seperti dalam penelitian sebelumnya terkait persepsi masyarakat yang menunjukkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki pandangan bahwa perempuan dianggap kurang mampu memahami dan membuat keputusan terkait beberapa hal penting (Götzmann & Bainton, 2021).

Merujuk pada hasil temuan serta pembahasan ditemukan keterbatasan dalam penelitian berupa keterbatasan data yang tersedia serta peneliti yang membatasi pembahasan yang cenderung menganalisis lebih dalam pada satu bidang saja yakni pada bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan lebih mengerucut kembali ke bagian penguatan kelembagaan dan organisasi perempuan. Maka, saran peneliti untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengkaji lebih dalam bidang lainnya sehingga dapat memberikan hasil yang lebih luas dan menyeluruh.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan dalam setiap indikator kinerja penyusunan anggaran responsif gender, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penyusunan anggaran responsif gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melaksanakan GAP, GBS, dan KAK dalam beberapa programnya yang berkaitan dengan permasalahan gender. Akan tetapi masih ditemukan beberapa hal penting yang perlu untuk diperhatikan yakni diantaranya data terpilah gender yang belum lengkap, karena ketersediaan data akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat belum dimiliki oleh dinas terkait. Data terpilah yang dimiliki hanya berupa data yang dihasilkan dari pelaksanaan program sebelumnya.

Sementara APKM hanya berupa faktor kesenjangan berbentuk narasi, bukan data yang menunjukkan proporsi yang jelas. Tentu hal tersebut akan berakibat pada penyusunan analisis melalui GAP, GBS, dan KAK yang menjadi kurang efektif. Sehingga akan lebih baik apabila dinas dapat menyusun data terpilah yang sesuai dan mencerminkan permasalahan dan kebutuhan yang ada.

## Daftar Pustaka

- Bandiyono, A., Asma, I., & Alam, N. (2022). Gender Responsive Planning And Budgeting Mechanism In Indonesia. 6(8), 441-460.
- Darwanis. (2015). Analisis Anggaran Responsif Gender sebagai Percepatan Pencapaian Target MDGs. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 481-492. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6038>
- Eleanora, F. N., Lestari, M. P., & Ismail, Z. (2021). Gender: Pemahaman Menuju Kesetaraan Gender. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo\\_de\\_Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUI-A-METODOLOGICA-EF.pdf%0A???%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/19239/18790%0A](http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo_de_Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUI-A-METODOLOGICA-EF.pdf%0A???%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/19239/18790%0A)
- Elson. (2001). Gender Budget Initiatives. In *North* (Issue October).
- Erol Akurdan, Ö. (2019). Gender Budgeting In Local Administration: İstanbul Beylikdüzü And Eskişehir Odunpazarı Cases. 34. *International Public Finance Conference*, 27-34. <https://doi.org/10.26650/pb/ss10.2019.001.004>
- Farida, S. I. (2019). Anggaran Responsif Gender Sebagai Suatu Instrumen Negara Untuk Pemenuhan Hak Perempuan Di Indonesia. *Jimf (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*,

- 1(2), 67-86.  
<https://doi.org/10.32493/frkm.v1i2.2541>
- Fithriyah, F. (2017). Indonesia's Experience: Implementing Gender Responsive Planning and Budgeting. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 1(1), 59-75.  
<https://doi.org/10.36574/jpp.v1i1.9>
- Gainau, P. C. (2018). Urgensi Penerapan Anggaran Responsif Gender Di Pemerintah Daerah. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 10(2), 126-143.  
<https://doi.org/10.37477/bip.v10i2.58>
- Ghaniu, P. C. (2019). Esensi Penyusunan Anggaran Responsif Gender di Pemerintah Daerah.
- Götzmann, N., & Bainton, N. (2021). Embedding gender-responsive approaches in impact assessment and management. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 39(3), 171-182.  
<https://doi.org/10.1080/14615517.2021.1904721>
- GÜREL, E. (2017). SWOT ANALYSIS: A THEORETICAL REVIEW. *The Journal of International Social Research*, 13(3), 1576-1580.
- Juliarini, A. (2019). Kinerja Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi Di Pulau Jawa. *Jurnal Good Governance*, 15(1), 934-957.  
<https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.99>
- Koesriwulandari, K. (2015). Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 15(2), 68-77.  
<https://doi.org/10.30742/jisa.v15i2.367>
- Lubaale, G. (2020). Gender Imbalances among Academic Staff and Development Implications in Kyambogo University of Uganda. *Research Journal of Educational Studies and Review*, 6(1), 9-22.  
[https://doi.org/10.36630/rjesr\\_20002](https://doi.org/10.36630/rjesr_20002)
- Ludgate, N. (2016). Harvard Analytical Framework. *Usaid*, 2, 1-3.  
[https://www.agrilinks.org/sites/default/files/resource/files/ING\\_Info\\_Sheet%282016\\_09%29\\_2\\_Harvard\\_Analytical\\_Framework%28Ludgate%29.pdf](https://www.agrilinks.org/sites/default/files/resource/files/ING_Info_Sheet%282016_09%29_2_Harvard_Analytical_Framework%28Ludgate%29.pdf)
- Ngoyo, M. F. (2015). Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan. *Sosioreligius*, 1(1), 77-88. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/view/4525>
- Nikore, M., Malhotra, G., Singh, U., & Chowdhury, A. (2022). An Analytical View of Gender-Responsive Budgeting in Pre- and Post-COVID-19 India. *March*, 5-23.  
<https://doi.org/10.52987/wlec.2022.001>
- Octaria, D. (2015). Analisis Anggaran Responsif Gender Sebagai Percepatan. 9(1), 481-492.
- Selvira, P., & Utomo, P. (2021). Gender Discourses Analysis: Representasi Bias Gender Dan Pengaruhnya Pada Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Islam Di Madrasah Ibtidai' yah. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(2), 155-168. DOI : 10.24235/equalita.v3i2.9839
- Setyawan, D., Firdausi, F., & Rusmiwari, S. (2018). Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur). *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1).  
<https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.2275>
- Sodani, P. R., & Sharma, S. (2008). Gender Responsive Budgeting. *Journal of Health Management*, 10(2), 227-240.  
<https://doi.org/10.1177/097206340801000205>
- Tazkia, A., & Cadith, J. (2022). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang Implementation of Gender Mainstreaming of Development in Pandeglang Regency. *XVIII(1)*, 25-44.
- Wahyuningsih, W. (2018). Millenium Development Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial. *Bisma*, 11(3), 390.  
<https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6479>

Widowati, G. R., Ludigdo, U., & Kamayanti, A. (2016). Persepsi Penyusun Anggaran Mengenai Konsep Kebijakan Anggaran Responsif Gender. *Journal of Research and Applications: Accounting and Management*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.18382/jraam.v2i1.67>